

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang maju, mandiri dan berdayasaing sebagai titik pusat perhatian dari segenap gerak pembangun, sekaligus sebagai modal dasar dan kekuatan daerah, pembangunan manusia menekankan pada peningkatan harkat, martabat hak dan kewajiban manusia yang tercermin pada peningkatan nilai seperti etika, estetika, logika. Nilai-nilai tersebut adalah beriman, bertaqwa, amanah, sadar akan harga diri, mandiri, cerdas, serta memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan pemantapan Pembangunan Perdesaan, berlandaskan religius, cultural dan berwawasan lingkungan. Pembangunan manusia sebagai sumber daya pembangunan menekankan manusia sebagai pelaku pembangunan yang memiliki etos kerja, produktif, terampil, kreatif, disiplin, professional serta memiliki ikemampuan untuk menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi (Iptek) maupun kemampuan manajemen.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan tuntutan yang tumbuh sejalan dengan perkembangan pembangunan yang makin cepat dan kompleks terutama perkembangan ekonomi, industrialisasi, arus informasi dan pesatnya perkembangan iptek yang makin menuntut sumber daya manusia yang tinggi kualitasnya. Dengan demikian peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi tuntutan yang sangat mendesak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- g. Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- j. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 2, Seri C.1);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7)
- m. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang kedudukan Organisasi tugas dan fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.
- n. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 31 Tahun 2021);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon tahun 2024 adalah untuk menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun berjalan.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon tahun 2024 adalah

1. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
2. Untuk mengetahui kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan selama tahun 2024
3. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah kedalam program dan kegiatan bidang Ketenagakerjaan.
4. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

RENJA tahun 2024 ini disusun dalam 4 (empat) BAB dengan sistematika :

Kata Pengantar

Daftar Isi

**BAB I      PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II     EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2022**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III    TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV    PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA DINAS KETENAGAKERJAAN TAHUN 2022

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Ketenagakerjaan

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Tahun 2022 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Tahun 2022 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta, seksi pelaksana. Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Ketenagakerjaan s/d Tahun 2022 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

**TABEL T-C.29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022**  
**Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah kesesuaian program dalam Renstra dan Renja, (Satuan: Dok)							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sektoral, (Satuan: Dok - Kumulatif)	1	3					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, (Satuan: Dok - Kumulatif)	2	6					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kinerja perangkat daerah, (Satuan: Laporan - Kumulatif)	2	4					
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja							

		Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, (Satuan: Dok)							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan, (Satuan: Pegawai - Non Kumulatif)							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan akhir tahun SKPD, (Satuan: Dok - Kumulatif)	33	33					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan semesteran dengan baik, (Satuan: Dok - Kumulatif)	1	1					
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Pakaian Dinas dan perlengkapan bagi pegawai, (Satuan: Pegawai)							
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dengan baik, (Satuan: Pegawai - Non Kumulatif)							
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Pelaksanaan	0						

		Administrasi umum Perangkat daerah dengan baik, (Satuan: bulan)							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia, (Satuan: unit - Non Kumulatif)	100	100					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor, (Satuan: item - Kumulatif)	90	90					
		Tercapainya Pengadaan Komputer dan Jaringan serta alat cetak paspor dengan baik, (Satuan: paket - Kumulatif)	10	10					
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah barang cetakan dan pengandaan yang tersedia, (Satuan: item - Non Kumulatif)	0	0					
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia, (Satuan: expl - Non	7	7					



		Kumulatif)							
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia, (Satuan: item - Non Kumulatif)	2780	2780					
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minuman yang tersedia, (Satuan: Bulan - Non Kumulatif)	50	50					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapaiannya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan baik, (Satuan: bulan - Non Kumulatif)	11	11					
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Pengadaan Barang milik daerah dengan baik, (Satuan: unit)	11	11					
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan baik, (Satuan: unit - Kumulatif)	0	0					
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	0	0					

		daerah dengan baik, (Satuan: persen)							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi Sumber daya, air dan listrik, (Satuan: Bulan - Non Kumulatif)	12	12					
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara, (Satuan: unit - Kumulatif)	11	11					
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Pemerintah daerah dengan baik, (Satuan: lokasi)	28	28					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan, (Satuan: unit - Non Kumulatif)							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau operasional lapangan yang terpelihara, (Satuan: unit - Non Kumulatif)	19	19					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala	25	25					

		Gedung Kantor dengan baik, (Satuan: Lokasi - Kumulatif)							
	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Prosentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkat)							
	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	Jumlah Seluruh Calon Tenaga Kerja Yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi, (Satuan: Orang)							
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Tersedianya Pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan, (Satuan: Orang - Kumulatif)							
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Dimagangkan dan Perusahaan yang memahami peraturan tentang pemagangan, (Satuan: Orang - Kumulatif)							
	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	Presentase LPK Yang Terakreditasi, (Satuan: Porsen)							

		Jumlah LPK Yang Dibina							
	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi, (Satuan: Prosen - Non Kumulatif Meningkatkan)							
	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Layanan Antar Kerja, (Satuan: orang)							
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Peserta Yang Mendapat Penyuluhan dan Bimbingan, (Satuan: orang - Kumulatif)							
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Rapat Koordinasi Sosialisasi Undang- undang No.8 Tahun 2016 tentang Kewajiban menempatkan Disabilitas bagi Perusahaan, (Satuan: Kali - Kumulatif)							
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan							

		Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja, (Satuan: Orang - Kumulatif)							
	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mengakses Informasi Pasar Kerja, (Satuan: orang)							
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mengakses Informasi Pasar Kerja, (Satuan: orang - Non Kumulatif)							
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Peserta Bursa Kerja, (Satuan: lowongan - Kumulatif)							
	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Calon PMI dan PMI Yang Dilindungi, (Satuan: Orang)							
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	CPMI Yang Mendapat Sosialisasi dan Fasilitas Kepulangan, (Satuan: orang - Kumulatif)							
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Calon PMI /Calon TKI Yang Dilayani, (Satuan: orang -							

		Kumulatif)							
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna Yang Diberdayakan, (Satuan: Orang - Kumulatif)							
	<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Tercapainya Target Retribusi IMTA, (Satuan: Rupiah)							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Target Retribusi IMTA, (Satuan: Orang - Kumulatif)							
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Prosentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Yang Layak, (Satuan: kasus - Kumulatif Menurun)							
	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah/Prosentase Perusahaan Yang Memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama, (Satuan: PP)							
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Difasilitasi Penyusunan Peraturan Perusahaan, (Satuan: PP -							

		Kumulatif)							
	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Difasilitasi Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama, (Satuan: PB - Kumulatif)							
	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah/Prosentase Perselisihan Yang Diselesaikan, (Satuan: Kasus)							
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya perselisihan kasus di perusahaan, (Satuan: kasus - Non Kumulatif)							
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Cirebon, (Satuan: struktur skala upah -Non Kumulatif)							
	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	bertambahnya wilayah tujuan transmigrasi, (Satuan: MoU - Kumulatif Meningkatkan)							

	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	- Tersedianya Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Terlaksananya sharing untuk penempatan calon transmigran asal kab.cirebon, (Satuan: MoU - Kumulatif)							
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM dengan baik, (Satuan: Desa - Kumulatif)							







## RIVEU TAHUN 2022:

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Tahun 2022, dari 3 (tiga) tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Cirebon, ditetapkan 4 (Empat) sasaran dengan 4 (Empat) Indikator sasaran, dengan didukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, untuk mewujudkan target kinerja sasaran-sasaran strategis di Kabupaten Cirebon.

Adapun hasil pengukuran atas indikator-indikator kinerja dari setiap sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon diuraikan dalam penjelasan berikut dibawah ini..

### **Tujuan/Sasaran : Meningkatkan kompetensi dan produktivitas pencari kerja**

Sasaran Meningkatkan kompetensi dan produktivitas pencari kerja, diukur melalui 1(satu) sasaran dengan 1 (Satu) indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja dari setiap sasaran dalam tujuan ini diuraikan melalui table pengukuran kinerja sasaran dan dengan penjelasan tabel berikut di bawah ini

NO	Indikator Kinerja	Uraian Kinerja Tahun 2022			Realisasi Kinerja Th 2022	Target RPJMD Th 2022	Target Nasional
		Traget Tahun 2022	Realisasi	Capaian %			
1	Prosentase Pertumbuhan Calon Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	9,09%	70,99%	70,99%	70,99%	9,09%	-

Cara penghitungan dari masing-masing indicator kinerja dalam table di atas adalah sebagai berikut :

### Metode Pengukuran

Indikator Kinerja	Cara Penghitungan
Prosentase Pertumbuhan Calon Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	Jumlah Penempatan Tenaga Kerja N dikurangi Jumlah Penempatan Tenaga Kerja tahun lalu N- 1 di bagi Jumlah penempatan Tenaga Kerja N di Kali 100%

Penjelasan:

Prosentase Pertumbuhan Calon Tenaga Kerja Yang Ditempatkan pada Tahun 2022 sebesar 69%. Jumlah Penempatan Tahun N ( $31.495-9.765/31.495 \times 100\%$ )

**Tujuan /Sasaran : Meningkatkan pencari kerja terdaftar yang bekerja**

Tujuan Meningkatkan pencari kerja terdaftar yang bekerja diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja dari setiap sasaran dalam tujuan ini diuraikan melalui table pengukuran kinerja sasaran dan dengan penjelasan tabel berikut di bawah ini

**Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran  
Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang bekerja**

NO	Indikator Kinerja	Uraian Kinerja Tahun 2022			Realisasi Kinerja Th 2022	Target RPJM D 2021	Target Nasional
		Traget Tahun 2022	Realisasi	Capaian %			
1	Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi	60%	72,52%	72,52%	72,52%	60%	

Cara penghitungan dari masing-masing indicator kinerja dalam table di atas adalah sebagai berikut :

Metode Pengukuran

Indikator Kinerja	Cara Penghitungan
Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi	$\frac{\text{Jumlah Pencari Kerja Yang bekerja}}{\text{Jumlah Pencari Kerja yang terdaftar}} \times 100$

Penjelasan:

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 31.495 orang sedangkan pencari kerja yang terdaftar berdasarkan Kartu Pencari Kerja (AK-1) atau Kartu Kuning sebanyak 43.428 orang.

**Tujuan 3 Terciptanya Hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan**

Tujuan Terciptanya Hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan diukur melalui 1 (satu) sasaran dengan 1 (Satu) indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja dari setiap sasaran dalam tujuan ini diuraikan melalui table pengukuran kinerja sasaran dan dengan penjelasan tabel berikut di bawah ini

**Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3  
Terciptanya Hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan**

NO	Indikator Kinerja	Uraian Kinerja Tahun 2022			Realisasi Kinerja Th 2022	Target RPJMD 2022	Target Nasional
		Traget Tahun 2022	Realisasi	Capaian %			
1	Penyelesaian Kasus melalui Perjanjian Bersama (PB)	36 Kasus	24 Kasus	24 kasus	24 Kasus	36 kasus	

Cara penghitungan dari masing-masing indicator kinerja dalam table di atas adalah sebagai berikut :

Metode Pengukuran

Indikator Kinerja	Cara Penghitungan
Penyelesaian Kasus melalui Perjanjian Bersama (PB)	Jumlah Kasus yang diselesaikan

Penjelasan:

Realisasi capaian kinerja Terciptanya Hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sebanyak 24 Kasus orang dari target 36 Kasus orang (capaian kinerja 66,67 %).

#### **Tujuan/ sasaran 4 : Terpenuhinya dukungan tata kelola perkantoran**

Tujuan Terpenuhinya dukungan tata kelola perkantoran diukur melalui 1 (satu) sasaran dengan 1 (Satu) indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja dari setiap sasaran dalam tujuan ini diuraikan melalui table pengukuran kinerja sasaran dan dengan penjelasan tabel berikut di bawah ini:

#### **Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 Terpenuhinya dukungan tata kelola perkantoran**

NO	Indikator Kinerja	Uraian Kinerja Tahun 2022			Realisasi Kinerja Th 2022	Target RPJM D 2022	Target Nasional
		Traget Tahun 2022	Realisasi	Capaian %			
1	Terpenuhinya dukungan tata kelola perkantoran	90%	77.71%	77,71%	77,71%	90%	

Penjelasan:

Realisasi capaian kinerja Terpenuhinyanya dukungan tata kelola Pemerintahan berupa Indkes kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 77,71 % dengan target 90%.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Cirebon yang terletak pada koordinat 108°40' – 108°48' Bujur Timur dan 6° 30' – 7° 00' Lintang Selatan terletak di wilayah dataran tinggi. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Cirebon: 990,36 Km<sup>2</sup> dengan Panjang garis pantai : 54 km

Dari sisi demografis, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sebanyak 2.270.621 jiwa pada tahun 2020 (Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2021).

Berdasarkan data dari Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon sebanyak 2.270.621 jiwa terdiri jumlah usia kerja 1.662.327 jiwa dan jumlah bukan usia kerja 601.965 jiwa. Jumlah usia kerja terdiri jumlah angkatan kerja sebanyak 1.060.362 jiwa dan jumlah bukan angkatan kerja sebanyak 714.166 jiwa. Sedangkan jumlah angkatan kerja terdiri dari jumlah yang bekerja sebanyak 938.217 jiwa dan jumlah yang menganggur sebanyak 122.145 jiwa.

Jika dilihat dari data diatas maka angka pengangguran terbuka Tahun 2021 di Kabupaten Cirebon masih tinggi sebanyak 122.145 jiwa (9,3 %) jiwa dan Rasio Penduduk Usia Kerja sebesar 59,06 % yakni yang bekerja sebanyak 102.878 jiwa dan jumlah angkatan kerja sebanyak 1.106.806 jiwa.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat permasalahan krusial Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon

### **2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Berdasarkan Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2019-2024, juga melihat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan pada tahun 2019-2024, maka dapat digambarkan perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD :

1. Tingginya jumlah Pengangguran terbuka.
2. Rendahnya daya saing dan kualifikasi Pencari Kerja menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean ( MEA ) 2015
3. Tingginya pelanggaran terhadap norma kerja dan norma Keselamatan dan kesehatan Kerja.
4. Tingginya penduduk miskin

### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Adapun perbandingan antara RKPD 2024 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas Tenaga Kerja sesuai tabel sebagai berikut :

**Tabel**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon**

Rancangan Awal RKPD					Rancangan Perubahan RKPD				
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disnakertrans	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.	80%		Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Ketenagakerjaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.	80%	
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Sektoral	1 Laporan	29.282.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Sektoral	1 Laporan	29.282.000
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Laporan	10.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Laporan	10.000.000
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Laporan	10.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Laporan	10.000.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	12.558.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Laporan	12.558.000
Sub Kegiatan	Dinas	Jumlah laporan	1 Laporan	75.000.000	Sub Kegiatan	Dinas	Jumlah laporan	1 Laporan	75.000.000



Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketenagakerjaan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kinerja perangkat daerah			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketenagakerjaan	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kinerja perangkat daerah		
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	33 Pegawai	8.822.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	33 Pegawai	8.822.000.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Laporan Akuntansi yang dilaporkan setiap bulan	12 Laporan	10.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Laporan Akuntansi yang dilaporkan setiap bulan	12 Laporan	10.000.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Ketenagakerjaan	Tersedianya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan baik	1 Laporan	6.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Ketenagakerjaan	Tersedianya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan baik	1 Laporan	6.000.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Ketenagakerjaan	Tersedianya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan baik	2 Laporan	5.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Ketenagakerjaan	Tersedianya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan baik	2 Laporan	5.000.000
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang milik daerah SKPD	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Penyusunan Laporan barang milik daerah yang tersusu	12 Laporan	10.000.000	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang milik daerah SKPD	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Penyusunan Laporan barang milik daerah yang tersusu	12 Laporan	10.000.000
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Ketenagakerjaan	Tersedianya Pakaian Dinas berserta Atributnya	100 Pegawai	100.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Ketenagakerjaan	Tersedianya Pakaian Dinas berserta Atributnya	100 Pegawai	100.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah komponen instalasi listrik	4 item	18.101.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah komponen instalasi listrik	4 item	18.101.000

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		penerangan bangunan kantor yang tersedia			Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		penerangan bangunan kantor yang tersedia		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	100 unit 1 Paket Alat cetak paspor	8.600.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	100 unit 1 Paket Alat cetak paspor	8.600.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	9 item	100,000,000,-	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	9 item	100,000,000,-
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	276 Exps	100,000,000,-	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	276 Exps	100,000,000,-
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	57 item	110,000,000,-	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	57 item	110,000,000,-
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Makan dan Minuman yang tersedia	11 Bulan	30.000.000,-	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Makan dan Minuman yang tersedia	11 Bulan	30.000.000,-
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Ketenagakerjaan	Tercapainya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan baik	12 Bulan	168.000.000,-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Ketenagakerjaan	Tercapainya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan baik	12 Bulan	168.000.000,-
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan				

Urusan Pemerintah Daerah					Pemerintah Daerah				
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Kendaraan dinas yang peroleh	2 Unit	750.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Kendaraan dinas yang peroleh	2 Unit	750.000.000
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah jasa komunikasi Sumber daya, air dan listrik	12 Bulan	400.000.000,-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah jasa komunikasi Sumber daya, air dan listrik	12 Bulan	400.000.000,-
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	20 Unit	65.000.000,-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Ketenagakerjaan	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	20 Unit	65.000.000,-
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan	19 Unit	200.000.000,-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan	19 Unit	129.556.100,-

Jabatan									
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau operasional lapangan yang terpelihara	52 Unit	27.551.700,-	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau operasional lapangan yang terpelihara	52 unit	27.551.700,-
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Ketenagakerjaan	Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan baik	3 Lokasi	8.500.000.000,-	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Ketenagakerjaan	Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan baik	3 Lokasi	8.500.000.000,-
<b>Program Hubungan Industrial</b>	<b>Dinas Ketenagakerjaan</b>	Prosentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Yang Layak	<b>2,49%</b>			<b>Dinas Ketenagakerjaan</b>	<b>Prosentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Yang Layak</b>	<b>2,49%</b>	
<b>Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Kerja bersama untuk beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota</b>									
Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan Yang Difasilitasi Penyusunan Peraturan Perusahaan	250 PP	120.000.000,-	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan Yang difasilitasi Penyusunan Peraturan Perusahaan	250 PP	120.000.000,-
Sub Kegiatan Pendaftaran	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan Yang	25 PB	120.000.000,-	Program Peningkatan	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan Yang	25 PB	120.000.000,-

Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan		Difasilitasi Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama			Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Difasilitasi Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama		
<b>Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan untuk beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota</b>									
Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan	Menurunnya perselisihan kasus di Perusahaan	36 Kasus	150.000.000,-	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan	Menurunnya perselisihan kasus di Perusahaan	36 Kasus	150.000.000,-
Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan	Meningkatnya Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Cirebon	3 rekomendasi	320.000.000,-	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketenagakerjaan	Meningkatnya Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Cirebon	3 Rekomendasi	320.000.000,-
<b>Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>	Dinas Ketenagakerjaan	Prosentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Berdasarkan Dokumen PTK : Tingkat Akurasi Indikator PTK	1 Dokumen			Dinas Ketenagakerjaan	Prosentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Berdasarkan Dokumen PTK : Tingkat Akurasi Indikator PTK	1 Dokumen	
<b>Kegiatan</b>									

<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>									
<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	Dinas Ketenagakerjaan	Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi	65%			Dinas Ketenagakerjaan	Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi	65%	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Kabupaten/Kota Satu) Daerah	Dinas Ketenagakerjaan	Tercapainya Target Retribusi IMTA	20 Dokumen	200.000.000.-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Kabupaten/Kota Satu) Daerah	Dinas Ketenagakerjaan	Tercapainya Target Retribusi IMTA	20 Dokumen	200.000.000.-
<b>Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>									
Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta Yang Mendapat Penyuluhan dan Bimbingan	100 Pencari Kerja	65.000.000.-	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta Yang Mendapat Penyuluhan dan Bimbingan	100 Pencari Kerja	65.000.000.-
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan	Rapat Koordinasi Sosialisasi Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang Kewajiban menempatkan	6 Kali	75.000.000.-	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan	Rapat Koordinasi Sosialisasi Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang Kewajiban	6 Kali	75.000.000.-

		Disabilitas bagi Perusahaan					menempatkan Disabilitas bagi Perusahaan		
Sub Kegiatan perluasan kesempatan kerja	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Pencari kerja yang mengikuti kegiatan padat karya	6.000 Pencari kerja	600.000.000	Sub Kegiatan perluasan kesempatan kerja	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Pencari kerja yang mengikuti kegiatan padat karya	6.000 Pencari kerja	600.000.000
<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>									
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mengakses Informasi Pasar Kerja	32.500 Pencari Kerja	250.000.000,-	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mengakses Informasi Pasar Kerja	32.500 Pencari Kerja	250.000.000,-
Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta Bursa Kerja	2.000 Pencari Kerja	175.000.000,-	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Peserta Bursa Kerja	2.000 Pencari Kerja	175.000.000,-
<b>Kegiatan Perlindungan PMI (Para dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten Kota</b>									
Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Dinas Ketenagakerjaan	CPMI Yang Mendapat Sosialiasi dan Failitasi Kepulauan	900 Pencari Kerja	225.000.000,-	Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Dinas Ketenagakerjaan	CPMI Yang Mendapat Sosialiasi dan Failitasi Kepulauan	900 Pencari Kerja	225.000.000,-
Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Calon PMI /Calon TKI Yang Dilayani	10.000 Pencari Kerja	100.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Calon PMI /Calon TKI Yang Dilayani	10.000 Pencari Kerja	100.000.000

Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah PMI Purna Yang Diberdayakan	160 Pencari Kerja	210.000.000,-	Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah PMI Purna Yang Diberdayakan	160 Pencari Kerja	210.000.000,-
<b>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>Dinas Ketenagakerjaan</b>	bertambahnya wilayah tujuan transmigrasi	<b>1 MoU</b>			<b>Dinas Ketenagakerjaan</b>	bertambahnya wilayah tujuan transmigrasi	<b>1 MoU</b>	
<b>Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari Daerah 1 (satu) Kabupaten/Kota</b>									
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Ketenagakerjaan	Tersedianya Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Terlaksananya sharing untuk penempatan calon transmigran asal kab.cirebon	1 MoU	225.000.000,-	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Ketenagakerjaan	Tersedianya Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Terlaksananya sharing untuk penempatan calon transmigran asal kab.cirebon	1 MoU	225.000.000,-
Sub Kegiatan Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Ketenagakerjaan	Tersedianya Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM dengan baik	25 Desa	170.000.000,-	Pembinaan Pencari Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	Tersedianya Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM dengan baik	25 Desa	170.000.000,-
<b>Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>Dinas Ketenagakerjaan</b>	Prosentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi				<b>Dinas Ketenagakerjaan</b>	Prosentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi		
<b>Kegiatan Pelaksanaan pelatihan</b>									



<b>berdasarkan unit kompetensi</b>									
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan	Tersedianya Pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan	2.460 Pencari Kerja	15.800.000.000,-	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Ketenagakerjaan	Tersedianya Pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan	2.460 Pencari Kerja	15.800.000.000,-
Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Dimagangkan dan Perusahaan yang memahami peraturan tentang pemagangan	200 Orang Pencari Kerja	500.000.000,-	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Dimagangkan dan Perusahaan yang memahami peraturan tentang pemagangan	200 Orang Pencari Kerja	500.000.000,-
<b>Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja swasta</b>	<b>Dinas Ketenagakerjaan</b>					Dinas Ketenagakerjaan			
Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Ketenagakerjaan	Jumlah LPK Yang Dibina	145 LPK	100.000.000,-	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dinas Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Peningkatan Pengembangan Kelembagaan dengan LPK Swasta	145 LPK	100.000.000,-
<b>JUMLAH</b>				21.626.669.700					21.626.669.700



Bidang ketenagakerjaan berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran terbuka, meningkatkan daya saing tenaga kerja dan menciptakan hubungan yang harmonis antara tenaga kerja dan dunia usaha.

Peningkatan kualitas produktivitas tenaga kerja secara sinergi akan meningkatkan daya saing secara otomatis diharapkan berdampak pada tingginya penyerapan tenaga kerja. Penduduk yang bekerja meningkat, pendapatan masyarakat akan bertambah, secara tidak langsung berdampak pada peningkatan indeks daya beli; indeks daya beli merupakan salah satu indikator pengukuran Indeks Pendapatan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon. Kebutuhan hidup minimum/layak (KHM/KHL) Tahun 2023 sebesar Rp. 2.279.982,77,- diharapkan pada tahun mendatang dapat dipertahankan besaran UMK nilainya sama dengan KHM/KHL, sehingga kebutuhan minimum para pekerja di Kabupaten Cirebon dapat terpenuhi. UMK tinggi, pekerja sejahtera, daya beli masyarakat meningkat.

Sesuai kondisi permasalahan di atas, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kualitas produktivitas pencari kerja, peluang kesempatan kerja, penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis, didukung dengan upaya pengawasan dalam penegakan supremasi hukum ketenagakerjaan di Kabupaten Cirebon yang dianggap belum maksimal, juga berdasarkan isu-isu strategis, maka perlu ditindaklanjuti dengan suatu rencana tindak berupa program dan kegiatan yang nyata, didukung dengan penyiapan landasan-landasan teknis dan operasional secara bertahap dalam upaya pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berkelanjutan.

Program dan kegiatan Ketenagakerjaan Tahun 2024 sudah disesuaikan dengan usulan program dan kegiatan masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Cirebon. Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan yang disusun dengan rencana pencapaian adapun program Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
3. Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Program Penempatan Tenaga Kerja;
5. Program Hubungan Industrial;

## 6. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah **“Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”** selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025. Program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2020 sejalan dengan visi Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi. Kemajuan ekonomi sangat ditentukan oleh gerak dunia usaha yang menciptakan lapangan kerja dan pendapatan.

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan berlandaskan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya. Sejalan dengan itu perlu adanya upaya:

- a. Perbaikan produktivitas nasional melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan yang sesuai kebutuhan pertumbuhan ekonomi;
- b. Penciptaan lapangan kerja formal yang melindungi pekerja Indonesia sertadilaksanakan berbasiskan hubungan industrial yang setara antara pekerja dan pengusaha;
- c. Perlindungan pekerja Indonesia, sebagai bagian dari perlindungan sosial, diberikan tidak hanya bagi pekerja formal namun juga pekerja informal;
- d. Perbaikan regulasi ketenagakerjaan untuk mendukung dunia usaha. Penanggulangan kemiskinan adalah upaya terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat yang mana masing-masing memiliki peran tersendiri, yaitu:
  - Peran masyarakat dan dunia usaha diarahkan dalam bentuk kemitraan dengan pemerintah daerah menyelesaikan masalah kemiskinan yang riil terjadi di suatu daerah;

- Dunia usaha membantu penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada daerah tertentu melalui pelaksanaan corporate social responsibility (CSR);
- Pemerintah Pusat mengkoordinasikan kegiatan pemerintah, masyarakat dan daerah.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Cirebon sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2014-2019, yaitu misi keenam Kabupaten Cirebon yaitu :**“Meningkatnya kualitas hidup Masyarakat melalui Pemenuhan Kebutuhan dasar Masyarakat, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan dan Ekonomi”**.

Sebagai penjabaran dari visi yang ingin dicapai maka dilakukan langkah-langkah yang tertuang dalam misi yang merupakan suatu usaha atau komitmen dalam upaya mewujudkan Visi yang telah ditetapkan dan disusun setelah mengkaji makna Visi dan Keserasiannya. Dengan memperhatikan isu strategis yang dihadapi serta memperhitungkan kemungkinannya untuk dijalankan dalam arah kebijakan dan pokok program. Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon. Tahun 2019–2024 diperlukan adanya komitmen dan Kerja sama semua pihak.

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan agar tujuan Organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, Tujuan Dinas Ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Menciptakan Tenaga Kerja yang komepeten, produktif dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan pasar;
2. Mewujudkan Transmigran yang sejahtera dan inovati;
3. Mewujudkan tata perkantoran yang efisien dan efektif;

Adapun program prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon diarahkan pada program prioritas yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

## **A. Tujuan dan Sasaran**

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi yang tidak terlepas dari arah RPJMD 2019-2024 yang berbunyi bahwa Pembangunan dibidang Ketenagakerjaan diprioritaskan pada peningkatan kompetensi dan daya saing Tenaga Kerja, pemantapan sistem jejering kerja dan sistem informasi Ketenagakerjaan, peningkatan peran lembaga Ketenagakerjaan, sinergitas system pendidikan dan ketenagakerjaan, dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Pada Pembangunan Bidang Ketransmigrasian diprioritaskan peningkatan penempatan transmigran, jumlah transmigran yang memperoleh peluang berusaha dan tempat tinggal dan pembinaan transmigran

melalui Program pengembangan wilayah transmigrasi dengan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sector dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi dengan tujuan dan sasaran sebagaimana tabel dibawah ini yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan:

### **Tujuan :**

1. Menciptakan Tenaga Kerja yang komepeten, produktif dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan pasar;
2. Mewujudkan Transmigran yang sejahtera dan inovati;
3. Mewujudkan tata perkantoran yang efisien dan efektif;

### **Sasaran:**

1. Meningkatnya Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.
2. Meningkatnya pencari Kerja yang terdaftar yang bekerja.
3. Terciptanya hubungan industri yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
4. Mewujudkan kesejahteraan melalui Kerjasama antar daerah (KSAD) Bidang ketransmigrasi yang saling menguntungkan.
5. Terpenuhinya dukungan tata kelola perkantoran.

### **Indikator Sasaran :**

1. Persentase Pertumbuhan calon tenaga kerja yang ditempatkan sebesar 7.69%.

2. Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi sebesar 70%
3. Penyelesaian Kasus melalui Perjanjian Bersama (PB) sebesar 36 kasus
4. Bertambahnya minat untuk transmigrasi dan meningkatnya kompetensi keterampilan calon transmigrasi sebesar (Kerjasama Antar Daerah (KSAD) adalah adanya kesepakatan antara Daerah Pengirim dan Penerima untuk Transmigrasi) sebesar 1 MoU
6. Meningkatkan Pelayanan publik secara prima sebesar 90%

#### **B. STRATEGI :**

1. Perluasan Kesempatan Kerja yang di dukung oleh peningkatan daya saing tenaga kerja
2. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui Pelatihan
3. Penyusunan kebijakan ketenagakerjaan dan serapan tenaga kerja lokal
4. Meningkatkan minat masyarakat dalam bertransmigrasi
5. Meningkatkan kemampuan pegawai

#### **C. ARAH KEBIJAKAN**

Sesuai dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan, maka arah kebijakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan menerapkan arah kebijakan, dalam mengaplikasikan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kegiatan sebagai berikut :

- a) Peningkatan Kualitas Produktivitas dan kompetensi serta perlindungan bagi tenaga kerja
- b) Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk kebutuhan pasar.
- c) Penguatan dukungan kesejahteraan dan peluang kerja bagi tenaga kerja lokal
- d) Meningkatkan minat masyarakat dalam bertaransmigrasi melalui Pelatihan dan Penyuluhan yang efektif.



e) Fasilitasi peningkatan kapasitas pegawai

### 3.3 Program dan Kegiatan

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Program dan Kegiatan setiap SKPD harus mengacu pada peraturan tersebut, sehingga setiap SKPD diharuskan untuk menyesuaikan Rencana Strategisnya, begitu juga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2023 dalam menyusun rencana program dan kegiatannya harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tersebut. Program dan Kegiatan tahun 2024 yang tertuang dalam table berikut:

**Tabel T—C.33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024**  
**Dan Perkiraan Maju tahun 2024**  
**Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal	2024		Kondisi Akhir	
						K	R P	K	Rp
						15	16	17	18
			Menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdayasaing sesuai dengan perkembangan pasar kerja.	Berkurangnya jumlah angka pengangguran terbuka	11,52 Prosen	9,9	18.820.000.000	9,9	59.182.461.450
			Meningkatnya kompetensi dan produktivitas pencari kerja	Prosentase Pertumbuhan Calon Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	12,5 Prosen	7,69	16.820.000.000	7,69	51.268.523.300
		03.	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Prosentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	0,91 Prosen	4,97	16.400.000.000	4,97	49.643.523.300
				Prosentase Pencari Kerja Pelatihan Yang Berbasis Kompetensi	0 Prosen	0		95	
		03.2.01.	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	Jumlah Seluruh Calon Tenaga Kerja Yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi	1.424 Orang	0	0	3.380	17.376.210.300
				Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	0 Orang	1.600	16.300.000.000	3.200	32.000.000.000
				Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	0 lembaga	10	16.300.000.000	20	32.000.000.000
		03.2.01.01.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Tersedianya Pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan	1.424 Orang	0	0	3.360	16.793.175.100
				Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	0 Orang	1.600	15.800.000.000	3.200	31.000.000.000

	03.2.01.02.	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Dimagangkan dan Perusahaan yang memahami peraturan tentang pemagangan	40 Orang	0	0	220	541.517.600
			Terselenggaranya kerjasama pemagangan dan dukungan instruktur serta sarana prasarana bagi pencari kerja 20 orang	20 Orang	0	0	20	41.517.600
			Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	0 Lembaga	10	500.000.000	20	1.000.000.000
	03.2.02.	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	Presentase LPK Yang Terakreditasi	13,43 Porsen	18,67	100.000.000	18,67	267.313.000
	03.2.02.01.		Jumlah LPK Yang Dibina	134 LPK	0	0	140	50.000.000
			Terselenggaranya Peningkatan Pengembangan Kelembagaan dengan LPK Swasta	20 LPK	0	0	20	17.313.000
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang, Dibina	0 LPK	150	100.000.000	295	200.000.000
	04.	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Presentase Penempatan Pencari Kerja Yang Terdaftar	50 Prosen	0		105	
	03.	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	bertambahnya wilayah tujuan transmigrasi	1 MoU	1	420.000.000	4	1.455.000.000
			Jumlah MOU dengan Wilayah Transmigrasi	0 MoU	0	0	1	170.000.000
	03.2.01.	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	0 KK	25	420.000.000	50	815.000.000
	03.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	- Tersedianya Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Terlaksananya sharing untuk penempatan calon transmigran asal kab.cirebon	1 MoU	0	0	2	340.000.000
			Terlaksananya sharing untuk penempatan calon transmigran asal kab.cirebon	2 KK	0	0	2	170.000.000
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah, Kabupaten/Kota	0 Laporan	1	250.000.000	2	475.000.000
	03.2.01.04.	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM dengan baik	25 Desa	0	0	50	300.000.000
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	0 KK	25	170.000.000	50	340.000.000
		Meningkatnya kompetensi dan produktivitas pencari kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	35.497.651 rupiah	37.210.744		37.210.744	
	03.	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0 rupiah	37.210.744		37.210.744	
		Meningkatnya pencari kerja terdaftar yang bekerja	Presentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) propinsi	40 Prosen	70	2.000.000.000	70	7.913.938.150
	02.	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	Presentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Berdasarkan Dokumen PTK : Tingkat Akurasi Indikator PTK	47,06 porsen	64,29	0	64,29	1.000.000.000
	02.2.01.	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0 Dok	0	0	1	500.000.000
	02.2.01.01.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen PTK Makro/Mikro (PTK Daerah dan Entitas Tenaga Kerja Mikro	1 Dok	0	0	0	0
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	0 Dok	0	0	1	500.000.000

	02.2.01.02.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Tercapainya Peningkatan Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja	1 Dok	0	0	1	500.000.000
	04.	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi	50 Prosen	70	2.000.000.000	70	6.913.938.150
	04.2.01.	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Layanan Antar Kerja	1.000 orang	0	0	1.000	825.550.000
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	0 Orang	0	0	0	0
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang, Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	0 Orang	20	650.000.000	40	1.290.000.000
	04.2.01.03.	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Peserta Yang Mendapat Penyuluhan dan Bimbingan	1.000 orang	0	0	1.000	55.000.000
			Terselenggaranya Pembinaan bagi Pencari kerja	100 Orang	0	0	100	56.000.000
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	0 Orang	1.000	70.000.000	2.000	135.000.000
	04.2.01.04.	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Rapat Koordinasi Sosialisasi Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang Kewajiban menempatkan Disabilitas bagi Perusahaan	0 Kali	0	0	6	70.550.000
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang, Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	0 Orang	20	80.000.000	40	155.000.000
	04.2.01.05.	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	0 Orang	1.000	500.000.000	6.000	1.700.000.000
	04.2.03.	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mengakses Informasi Pasar Kerja	37.856 orang	0	0	30.000	415.000.000
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem, Online (Karir Hub)	0 Pencari Kerja	32.500	450.000.000	65.000	875.000.000
	04.2.03.02.	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mengakses Informasi Pasar Kerja	37.856 orang	0	0	30.000	250.000.000
			Tertelaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	0 Orang	0	0	100	257.388.150
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem, Online (Karir Hub)	0 Pencari Kerja	32.500	250.000.000	65.000	500.000.000
	04.2.03.03.	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Peserta Bursa Kerja	2.000 lowongan	0	0	2.000	165.000.000
			Terselenggaranya fasilitasi pemberi kerja	0 Lowongan	0	0	2.000	100.000.000
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan, Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	0 Pencari Kerja	2.000	200.000.000	4.000	375.000.000
	04.2.04.	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Calon PMI dan PMI Yang Dilindungi	900 Orang	0	0	1.800	1.060.000.000
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	0 Orang	5.000	700.000.000	10.000	1.235.000.000
	04.2.04.01.	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	CPMI Yang Mendapat Sosialisasi dan Fasilitas Kepulangan	900 orang	0	0	900	250.000.000
			Terselenggaranya fasilitasi pemberi kerja Prosedur Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	0 Orang	0	0	900	210.000.000
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	0 Orang	5.000	300.000.000	10.000	525.000.000
	04.2.04.02.	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah Calon PMI /Calon TKI Yang Dilayani	0 orang	0	0	18.000	200.000.000
			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	0 Orang	5.000	100.000.000	10.000	200.000.000

	04.2.04.03.	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna Yang Diberdayakan	80 Orang	240	300.000.000	560	800.000.000
			Tertindakannya Pelayanan CPMI di Kabupaten Cirebon	0 Orang	0	0	9.000	110.000.000
	04.2.05.	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Target Retribusi IMTA	300.000.000 Rupiah	300.000.000	200.000.000	1.200.000.000	800.000.000
			Raperda Perda Retribusi Daerah Penggunaan Tenaga Kerja Asing	0 Dok	0	0	1	200.000.000
	04.2.05.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Target Retribusi IMTA	0 Orang	20	200.000.000	80	800.000.000
			Perda Retribusi Daerah Penggunaan Tenaga Kerja Asing	0 Dok	0		1	
<b>Menciptakan tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdayasaing sesuai dengan perkembangan pasar kerja.</b>			Mewujudkan hubungan industrial yang baik dan peningkatan kepesertaan BPJS.	32,52 Prosen	710.000.000	70	790.000.000	70
	Terciptanya Hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan		Penyelesaian Kasus melalui Perjanjian Bersama (PB)	20 kasus	710.000.000	36	790.000.000	36
	05.	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Prosentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Yang Layak	1,87 kasus	710.000.000	2,8	790.000.000	9,53
			Jumlah Kasus Antara Pekerja dan Perusahaan yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama	0 kasus	0	0	0	40
	05.2.01.	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah/Prosentase Perusahaan Yang Memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	100 PP	0	0	0	200
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di, WLKP Online	0 Perusahaan	240.000.000	300	260.000.000	550
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian, Kerja Bersama	0 Perusahaan	240.000.000	30	260.000.000	55
	05.2.01.01.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Difasilitasi Penyusunan Peraturan Perusahaan	100 PP	0	0	0	300
			Meningkatnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan	0 Orang	0	0	0	400
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di, WLKP Online	0 Perusahaan	120.000.000	300	130.000.000	550
	05.2.01.02.	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang Difasilitasi Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama	20 PB	0	0	0	40
			Terwujudnya Kondisi Perusahaan menjadi lebih baik	0 Orang	0	0	0	250
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian, Kerja Bersama	0 Perusahaan	120.000.000	30	130.000.000	55
	05.2.02.	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah/Prosentase Perselisihan Yang Diselesaikan	20 Kasus	0	0	0	36
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	0 lembaga	470.000.000	1	530.000.000	2
	05.2.02.02.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya perselisihan kasus di perusahaan	20 kasus	0	0	36	200.000.000
			Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	0 Perkara	36	175.000.000	72	325.000.000
	05.2.02.04.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Cirebon	3 struktur skala upah	0	0	3	565.000.000

			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	0 Lembaga	1	355.000.000	2	675.000.000
<b>Mewujudkan Transmigran yang inovatif dan sejahtera</b>			Jumlah MoU dengan Wilayah Transmigrasi	40 persen	40		40	
	Mewujudkan kesejahteraan melalui kerjasama antar daerah (KSAD) Bidang Ketransmigrasian yang saling menguntungkan		bertambahnya wilayah tujuan transmigrasi	1 MoU	0		0	
<b>Mewujudkan tata kelola perkantoran yang efisien dan efektif</b>			Meningkatnya tertib administrasi yang lebih baik	90 Prosen	90	28.221.248.670	90	101.317.635.370
	Terpenuhinya dukungan tatakelola perkantoran		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 Prosen	90	28.221.248.670	90	101.317.635.370
	01.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.	80 Prosen	80	28.221.248.670	80	101.317.635.370
	01.2.01.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Jumlah kesesuaian program dalam Renstra dan Renja	1 Dok	1	136.840.800	3	358.948.800
	01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sektoral	1 Dok	0	0	3	51.200.000
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dok	1	29.282.000	2	55.902.000
	01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0 Dok	1	10.000.000	2	20.000.000
	01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0 Dok	1	10.000.000	2	20.000.000
	01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Dok	0	0	6	25.000.000
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Dok	2	12.558.800	4	22.558.800
	01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kinerja perangkat daerah	16 Laporan	0	0	1	62.280.000
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat, Daerah	0 Dok	1	75.000.000	2	144.008.000
	01.2.02.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dok		8.476.000.000	-*1	8.843.000.000
	01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	33 Pegawai		0	0	0
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan, Tunjangan ASN	0 Orang		8.455.000.000	44	8.822.000.000
	01.2.02.04.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan, Akuntansi SKPD	0 Dokumen		10.000.000	14	10.000.000
	01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan akhir tahun SKPD	1 Dok		0	0	0
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Dok		6.000.000	1	6.000.000
	01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusnya Laporan semesteran dengan baik	2 Dok		0	0	0
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Dok		5.000.000	2	5.000.000
	01.2.03.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				0		0
	01.2.03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Dok		10.000.000	14	10.000.000
	01.2.05.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Pakaian Dinas dan perlengkapan bagi pegawai	100 Pegawai		100.000.000	100	100.000.000

	01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dengan baik	100 Pegawai	0	0	0	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut, Kelengkapan	0 Paket	100.000.000	100	100.000.000	
	01.2.06.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi umum Perangkat daerah dengan baik	12 bulan	9.114.910.000	12	9.131.101.000	
	01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia	4 unit	0	0	0	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	16.910.000	100	18.101.000	
	01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor	20 item	0	0	0	
			Tercapainya Pengadaan Komputer dan Jaringan serta alat cetak paspor dengan baik	0 paket	2.600.000.000	1	2.600.000.000	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	6.000.000.000	20	12.000.000.000	
	01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	9 item	0	7	205.000.000	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	100.000.000	18	200.000.000	
	01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	276 expl	0	3.707	165.000.000	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dok	100.000.000	552	200.000.000	
	01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	57 item	0	57	185.000.000	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	110.000.000	114	210.000.000	
	01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minuman yang tersedia	11 Bulan	0	11	40.000.000	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	35.000.000	22	65.000.000	
	01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan baik	12 bulan	0	12	341.000.000	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	168.000.000	20	336.000.000	
	01.2.07.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Pengadaan Barang milik daerah dengan baik	2 unit	750.000.000	6	2.500.000.000	
	01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan baik	0 unit	0	4	1.005.000.000	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	750.000.000	4	1.500.000.000	
	01.2.08.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah dengan baik	100 porsen	520.000.000	100	1.420.000.000	
	01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi Sumber daya, air dan listrik	12 Bulan	0	0	12	725.000.000
			Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	0	0	12	350.000.000
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	12	450.000.000	24	850.000.000
	01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	100 unit	0	0	50	90.000.000
			Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasana dengan baik	50 unit	0	0	50	30.000.000

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN CIREBON**

**1. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**

**A. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi**

1.1. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 8.200.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Prosentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	4,67%
2	Masukan	Jumlah Dana	Rp 8.200.000.000,-
3	Keluaran	Tersedianya Pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan	2.120 Pencari Kerja
4	Hasil	Prosentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	4.67%

1.2. Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja dengan besaran anggaran Rp. 500.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Prosentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	4,67%
2	Masukan	Jumlah Dana	Rp 500.000.000,-
3	Keluaran	Jumlah Seluruh Calon Tenaga Kerja Yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi	2.120 Pencari Kerja
4	Hasil	Prosentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	4.67%

**B. Pembinaan Lembaga Pelatihan swasta**

1.3. Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan besaran Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Prosentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	4,67%
2	Masukan	Jumlah Dana	Rp 100.000.000,-
3	Keluaran	Presentase LPK Yang Terakreditasi	145 LPK
4	Hasil	Prosentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	4.67%

## 2. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

### A. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

- 2.1. Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 65.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Prosentase Pertumbuhan Calon Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	8,03%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 65.000.000,-
3	Keluaran	Jumlah Peserta Yang Mendapat Penyuluhan dan Bimbingan	1.000 Pencari Kerja/10 BKK
4	Hasil	Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi	65 %

- 2.2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 75.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Prosentase Pertumbuhan Calon Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	8,03%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 75.000.000,-
3	Keluaran	Rapat Koordinasi Sosialisasi Undang-undang No.8 Tahun 2016 tentang Kewajiban menempatkan Disabilitas bagi Perusahaan	6 Kali
4	Hasil	Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi	65 %

### B. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

- 2.3. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 250.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Prosentase Pertumbuhan Calon Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	8,03%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 250.000.000,-
3	Keluaran	Jumlah Calon Tenaga Kerja Yang Mengakses Informasi Pasar Kerja	30.000 Pencari Kerja
4	Hasil	Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi	65 %



2.4. Sub Kegiatan Job Fair dengan besaran anggaran yang disetujui sebesar Rp. 175.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Prosentase Pertumbuhan Calon Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	8,03%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 175.000.000,-
3	Keluaran	Jumlah Peserta Bursa Kerja	2.000 Lowongan
4	Hasil	Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi	65 %

### C. Perlindungan PMI (Para dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

2.5. Sub Kegiatan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 225.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Prosentase Pertumbuhan Calon Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	8,03%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 225.000.000,-
3	Keluaran	CPMI Yang Mendapat Sosialisasi dan Failitasi Kepulangan	900 Orang
4	Hasil	Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi	65 %

2.6. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 100.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Prosentase Pertumbuhan Calon Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	8,03%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 100.000.000,-
3	Keluaran	Jumlah Calon PMI /Calon TKI Yang Dilayani	9.000 Orang
4	Hasil	Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi	65 %

2.7. Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 210.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Prosentase Pertumbuhan Calon Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	8,03%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 210.000.000,-
3	Keluaran	Jumlah PMI Purna Yang Diberdayakan	80 Orang
4	Hasil	Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi	65 %

**C. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

2.8. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 200.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Prosentase Pertumbuhan Calon Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	8,03%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 200.000.000,-
3	Keluaran	Tercapainya Target Retribusi IMTA	20 Orang
4	Hasil	Prosentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) propinsi	65 %

**3. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**

**A. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Kerja Bersama untuk Perusahaan yang beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

3.1 Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 120.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Penyelesaian Kasus melalui Perjanjian Bersama (PB)	36 Kasus
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 120.000.000,-
3	Keluaran	Jumlah Perusahaan Yang Difasilitasi Penyusunan Peraturan Perusahaan	200 PP

4	Hasil	Prosentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Yang Layak	2,49%
---	-------	--	-------

3.2. Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 120.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Penyelesaian Kasus melalui Perjanjian Bersama (PB)	36 Kasus
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 120.000.000,-
3	Keluaran	Jumlah Perusahaan Yang Difasilitasi Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama	20 PKB
4	Hasil	Prosentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Yang Layak	2,49%

**B. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah 1 (satu) Kabupaten/Kota**

3.3 Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan besaran anggaran yang di usulkan sebesar Rp. 150.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Penyelesaian Kasus melalui Perjanjian Bersama (PB)	36 Kasus
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 150.000.000,-
3	Keluaran	Menurunnya perselisihan kasus di perusahaan	36 Kasus
4	Hasil	Prosentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Yang Layak	2,49%

3.4 Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota dengan besaran anggaran yang di usulkan sebesar Rp. 320.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Penyelesaian Kasus melalui Perjanjian Bersama (PB)	36 Kasus
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 320.000.000,-
3	Keluaran	Meningkatnya Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Cirebon	3 Rekomendasi
4	Hasil	Prosentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Yang Layak	2,49%

#### 4. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

##### A. Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 225.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Bertambahnya minat untuk transmigrasi dan meningkatnya kompetensi keterampilan calon transmigrasi	1 MoU
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 225.000.000,-
3	Keluaran	Tersedianya Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1 MoU
4	Hasil	Jumlah MOU dengan Wilayah Transmigrasi	1 MoU

3.3. Sub Kegiatan Pemandangan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp.170.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Bertambahnya minat untuk transmigrasi dan meningkatnya kompetensi keterampilan calon transmigrasi	1 MoU
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 170.000.000,-
3	Keluaran	Tersedianya Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM dengan baik	25 Desa
4	Hasil	Jumlah MOU dengan Wilayah Transmigrasi	1 MoU

#### 5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

##### A. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

5.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 26.620.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan publik secara prima	90%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 26.620.000,-
3	Keluaran	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Sektoral dengan	1 Dokumen

		baik	
4	Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.	80%

- 5.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 10.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan publik secara prima	90%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 10.000.000,-
3	Keluaran	Tersedianya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan baik	2 Laporan
4	Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.	80%

- 5.3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 69.008.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan publik secara prima	90%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 69.008.000,-
3	Keluaran	Tersedianya laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan baik	2 Laporan
4	Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.	80%

## B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 5.4. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 8.455.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan publik secara prima	90%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 8.455.000.000,-
3	Keluaran	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	33 Pegawai
4	Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.	80%

5.5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 6.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan publik secara prima	90%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 6.000.000,-
3	Keluaran	Tersedianya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan baik	1 Laporan
4	Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.	80%

5.6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 5.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan publik secara prima	90%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 5.000.000,-
3	Keluaran	Tersedianya Penyusunan Pelaporan Semesteran dengan baik	2 Laporan
4	Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.	80%

### C. Kegiatan Kepegawaian Administrasi Perangkat Daerah

5.7. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 100.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan publik secara prima	90%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 100.000.000,-
3	Keluaran	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya dengan baik	100 stel
4	Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.	80%

### D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

5.8. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 16.910.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan publik secara prima	90%

2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 16.910.000,-
3	Keluaran	Tercapainya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan dengan baik	100 unit
4	Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.	80%

5.9. Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 5.000.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan publik secara prima	90%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 5.000.000.000,-
3	Keluaran	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 unit
4	Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.	80%

5.10. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 100.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan publik secara prima	90%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 100.000.000,-
3	Keluaran	Tercapainya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan baik	9 item
4	Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.	80%

5.11. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 100.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan publik secara prima	90%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 100.000.000,-
3	Keluaran	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan baik	276 EXPL
4	Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.	80%

5.12. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 100.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan publik secara prima	90%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 100.000.000,-
3	Keluaran	Tercapainya Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan baik	57 Item
4	Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.	80%

5.13. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 30.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan publik secara prima	90%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 30.000.000,-
3	Keluaran	Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman dengan baik	11 Bulan
4	Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.	80%

5.14. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 168.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan publik secara prima	90%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 168.000.000,-
3	Keluaran	Tercapaiannya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan baik	12 Bulan
4	Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.	80%

#### E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5.15. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 750.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan publik secara prima	90%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 750.000.000,-
3	Keluaran	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan baik	4 Unit
4	Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi	80%



		perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.	
--	--	--	--

#### F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5.16. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 375.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan publik secara prima	90%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 375.000.000,-
3	Keluaran	Tersedianya Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan
4	Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.	80%

5.17. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 65.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan publik secara prima	90%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 65.000.000,-
3	Keluaran	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	20 Unit
4	Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.	80%

#### G. Pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

5.18. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 200.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan publik secara prima	90%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 200.000.000,-
3	Keluaran	Tercapainya Penyediaan Jasa BBM bagi kendaraan pegawai	19 Unit
4	Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.	80%

- 5.18. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 27.551.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan publik secara prima	90%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 27.551.000,-
3	Keluaran	Tercapainya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dengan baik	52 unit
4	Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.	80%

- 5.19. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan besaran anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 4.000.000.000,-

No	Narasi	Tolok Ukur	Target Kinerja
1	Capaian Program	Meningkatnya Pelayanan publik secara prima	90%
2	Masukan	Jumlah dana yang dibutuhkan	Rp 4.000.000.000,-
3	Keluaran	Tercapainya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan baik	3 Lokasi
4	Hasil	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima.	80%

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagai pengembangan tugas pokok dan fungsi, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon berusaha semaksimal mungkin mengerahkan seluruh potensi baik aparatur maupun fasilitas kerja lainnya untuk menggapai hasil maksimal melalui sasaran dan kegiatan yang sudah ditetapkan.

Sasaran dan Terget Kinerja dalam tahun kedepan sudah terurai dalam Rencana Pembangunan Strategis, namun demikian tugas pokok dan fungsi yang belum dapat tercapai tentunya tidak menyebabkan menurunnya kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, justru diharapkan dapat memicu dan memacu agar seluruh komponen mampu meningkatkan diri agar capaian kinerja dari periode ke periode berikut menjadi lebih baik dan terus menerus mengalami peningkatan.

Kelemahan adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah mekanisme kerja yang dikembangkan dan itu akan menjadi cerminan untuk senantiasa tidak pernah puas dan tetap selalu melakukan introspeksi dan self control di semua tingkatan organisasi Satuan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon dapat dilaksanakan sesuai target dan rencana yang lebih baik sekarang maupun yang akan datang dan dapat menambah bagi kemajuan Kabupaten Cirebon secara keseluruhan dan bermanfaat bagi percepatan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon.